

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-511 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : 33/P-RENJA-MAA/2026

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-511 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun 2006 Dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Propvinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
2. Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor 008.2.4/646/SE/2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan Daftar Nomor Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP) Tahun 2026;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 September 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAIFUL BAHRI ABUBAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 511 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR NOMOR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	NOMOR RENJA	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*
1	01/P-Renja-PK/2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	02/ P-Renja-Dinkes/2026	Dinas Kesehatan
3	03/P-Renja-PUPR/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	04/P-Renja-Kesbangpol/2026	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	05/P-Renja-Satpol PP/2026	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
6	06/P-Renja-Dinsos/2026	Dinas Sosial
7	07/P-Renja-DPMPTSP dan Naker/ 2026	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8	08/P-Renja-PP, PA dan KB/2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	09/P-Renja-DKPP dan Pangan/2026	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
10	10/P-Renja-DPN/2026	Dinas Pertanahan
11	11/P-Renja-DLH/2026	Dinas Lingkungan Hidup
12	12/P-Renja-Disduk Capil/2026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	13/P-Renja-DPMG/2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
14	14/P-Renja-Dishub/2026	Dinas Perhubungan
15	15/P-Renja-Diskominfo/2026	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
16	16/P-Renja-Disperindagkop dan UKM/2026	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17	17/P-Renja-Disporapar/2026	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
18	18/P-Renja-Arpus/2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	19/P-Renja-Setdako/2026	Sekretariat Daerah Kota
20	20/P-Renja-Sekwan/2026	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota

NO	NOMOR RENJA	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	*2*	*3*
21	21/P-Renja-Banda Sakti/2026	Kecamatan Banda Sakti
22	22/P-Renja-Muara Dua/2026	Kecamatan Muara Dua
23	23/P-Renja-Blang Mangat/2026	Kecamatan Blang Mangat
24	24/P-Renja-Muara Satu/2026	Kecamatan Muara Satu
25	25/P-Renja-BPBD/2026	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	26/P-Renja-Inspektorat/2026	Inspektorat
27	27/P-Renja-Bappeda/2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	28/P-Renja-BPKD/2026	Badan Pengelola Keuangan Daerah
29	29/P-Renja-BKPSDM/2026	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	30/P-Renja-DSI dan Pendidikan Dayah/2026	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
31	31/P-Renja-MPU/2026	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
32	32/P-Renja-Baitul Mal/2026	Sekretariat Baitul Mal
33	33/P-Renja-MAA/2026	Sekretariat Majelis Adat Aceh
34	34/P-Renja-MPD/2026	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

KAYUTI ABUBAKAR

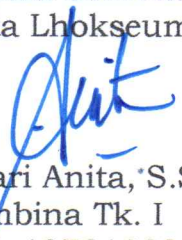
KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026. Perubahan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026, perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, serta kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan program dan kegiatan secara lebih efektif, efisien, terarah, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan kelembagaan adat, pelestarian adat dan budaya Aceh, serta pemajuan kebudayaan lokal di Kota Lhokseumawe.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempu rnaan perencanaan kedepan. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan Renja ini.

Lhokseumawe, September 2026
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe



Shari Anita, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19781029 200502 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah I-3

1.3. Maksud dan Tujuan I-4

1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 ..... II-1

2.1. Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Renja Perangkat Daerah II-1

2.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah II-2

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1

3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah III-1

3.2. Perubahan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah III-2

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah III-2

BAB IV PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	II-3
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	III-8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe Tahun 2026 telah dijalankan hingga triwulan II. Pada Tahun 2026 telah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil Rencana Kerja Tahun 2026 yang bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rencana Strategis Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe 2025-2029 dapat dicapai. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPK 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
6. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
7. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2026.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan Daerah Tahun 2026 di Kota Lhokseumawe.

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Gambaran tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor 000.8.2.4/646/SE/2026 tanggal 05 Juni 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dasar pertimbangan perubahan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah meliputi:

1. Adanya perubahan kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

   Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2026 perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

   a. berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II seluruh kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan perincian APBK tahun 2026;
   b. perlu adanya penyesuaian karena seluruh kegiatan pada triwulan yang sudah berjalan belum terlaksana sesuai anggaran yang tersedia disetiap triwulannya.
   c. perubahan Rencana Kerja pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dilakukan dalam rangka penyesuaian pelaksanaan program/kegiatan.
   d. adanya penyesuaian tambahan gaji PPPK s.d Desember 2026, berdasarkan keputusan menteri keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 yang mengatur tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026. Penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Treasury Deposit Facility (TDF).
2. Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

   a. Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

Perubahan RKPK Kota Lhokseumawe dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dipengaruhi oleh perubahan asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional dan Daerah yang diperkirakan akan terjadi pada Tahun 2026.

b. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kota Lhokseumawe mengalami beberapa perubahan berkaitan dengan terjadinya beberapa pergeseran, penambahan dan juga pengurangan belanja daerah Kota Lhokseumawe dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun 2026. Perubahan tersebut dilakukan karena ada pergeseran anggaran yang dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah terkait kegiatan yang mendesak yang harus dilakukan sebelum dilakukannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (P-APBK) Lhokseumawe Tahun 2026. Dengan adanya pergeseran anggaran tersebut yang dituangkan kedalam Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja RKPD tahun 2026, sehingga mengharuskan Kota Lhokseumawe untuk melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun 2026 yang diawali dengan Perubahan RKPK Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026. Sedangkan tujuan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026:

1. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026

dengan berdasarkan pada Perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2026;

2. Pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Gambaran tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
- 2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Renja Perangkat Daerah
- 2.2 Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 3.1 Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Perubahan Indikator Kinerja Program
- 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rata-rata realisasi kinerja dan anggaran kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan triwulan II mencapai 8,03%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi anggaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada tahun 2026 sampai dengan triwulan II secara umum tergolong sangat rendah. Ada beberapa sub kegiatan atau belanja yang tidak tercukupi sehingga perlu dilakukan Perubahan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Uraian mengenai pencapaian kegiatan per program akan dijelaskan dibawah ini:

A. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Uraian mengenai pencapaian kegiatan per program akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

persentase kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2026 sebesar 12,27% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 915.284.616. Program ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu : i. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah, iv. Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah, v. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan terdiri dari 12 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,

Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. **Program Sekretariat Majelis Adat Aceh,**
   persentase kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2026 sebesar 2,23%, dan realisasi anggaran Rp. 26.795.000. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan yaitu : i. Pelestarian dan Pembinaan Adat, ii. Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat, iii. Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat, dan terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu Sosialisasi Adat Istiadat, Publikasi Adat dan Adat Istiadat melalui Media Luar Ruang, Penguatan Peradilan Adat dan Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat.

2.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil evaluasi pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Semua sub kegiatan pada Program Sekretariat Majelis Adat Aceh, persentase kinerja dan anggaran sampai dengan triwulan II ini telah dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia di setiap triwulan.
2. Rata-rata realisasi kinerja dan anggaran pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe sampai dengan triwulan II Tahun 2026 mencapai 8,03.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

1. seluruh Kepala Sub Bagian telah melaksakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia setiap triwulan; dan

2. tidak terdapat kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan, masing-masing sub bagian diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai anggaran sampai dengan akhir tahun.

Adapun rincian Evaluasi hasil pelaksanaan kerja sampai triwulan II pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

TABELI 2.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2026
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K%	Rp%		
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**8.658.128.119**		**1.692.448.224**		**1.692.691.920**		**445.401.527**		**496.678.088**						**942.079.615**		**942.079.615**	**8,03**	**10,88**		
		2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.457.200.783**		**1.526.639.539**		**1.612.691.920**		**445.401.527**		**469.883.088**						**915.284.615**		**915.284.615**	**2,5**	**12,27**	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Angka)	64		88,68		62,15		27,62		56,76						56,76		56,76		88,69			
		2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.316.410		4.352.638		1.500.000		-		-						-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		17		7		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			34.400.000		4.352.638		1.500.000		-		-						-		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		17		7		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			916.410		-		-		-		-						-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K%	Rp%		
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.486.445.535		992.991.868		1.194.342.000		385.141.527		368.501.888						753.643.415		753.643.415	1,31	16,8		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	560		112		294		22		22						22		22		3,93			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.485.445.535		992.991.868		1.194.342.000		385.141.527		368.501.888						753.643.415		753.643.415	3,93	16,8		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	560		112		294		22		22						22		22		3,93			
		2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersusunnya Data dan Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			311.500.000		50.726.241		33.500.000		990.000		7.851.200						8.841.200		8.841.200	2,86	2,84		
			Tersedianya Dokumen administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		6		4		0		0						0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		2		2		0						0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		2		0		0						0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		14		0		0		0						0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K%	Rp%		
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		10		10		0		2						2		2		20			
		2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52.000.000		6.418.930		7.000.000		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		6		4		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.000.000		7.455.000		5.000.000		990.000		-						990.000		990.000	0	3,96		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		2		2		0						0		0		0			
		2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			37.000.000		2.993.111		1.500.000		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		2		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700.000		798.000		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		14		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190.800.000		33.061.200		20.000.000		-		7.851.200						7.851.200		7.851.200	20	4,11		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		10		10		0		2						2		2		20			
		2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			131.200.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			30.400.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			31.200.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.200.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K%	Rp%		
		2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			38.900.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.098.948.800		421.218.780		341.800.000		54.150.000		85.450.000						139.600.000		139.600.000	4,03	6,65		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9		1		1		1		1						1		1		11,11			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	660		134		134		33		33						33		33		5			
		2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000		800.000		500.000		250.000		250.000						500.000		500.000	11,11	5		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9		1		1		1		1						1		1		11,11			
		2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.200.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.998.748.800		420.418.780		341.300.000		53.900.000		85.200.000						139.100.000		139.100.000	5	6,96		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	660		134		134		33		33						33		33		5			
		2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			390.790.038		57.350.012		41.549.920		5.120.000		8.080.000						13.200.000		13.200.000	8	3,38		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		1		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1						1		1		20			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		10		1		0						0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			157.100.000		26.863.012		15.600.000		2.250.000		2.250.000						4.500.000		4.500.000	20	2,86		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		1		1		1		1						1		1		20			
		2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			137.100.000		20.800.000		15.749.920		2.250.000		5.830.000						8.080.000		8.080.000	20	5,89		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		1		1		1		1						1		1		20			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K%	Rp%		
		2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.622.802		-		5.000.000		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0			
		2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			32.958.618		9.687.000		5.200.000		620.000		-						620.000		620.000	0	1,88		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		10		1		0						0		0		0			
		2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			33.008.618		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07	**PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)**			**1.200.927.336**		**165.808.685**		**80.000.000**		**-**		**26.795.000**						**26.795.000**		**26.795.000**	**18,45**	**2,23**	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
			Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh (Nilai)	99		97,43		97,44				33,49						33,49		33,49		33,83			
		2.22.07.7.01	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat			538.046.748		63.379.345		40.000.000		-		6.880.000						6.880.000		6.880.000	33,33	1,28		
			Terlaksananya Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi (Lembaga)	2		9		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat (Orang)	25		20		50		0		25						25		25		100			
				Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina (Keluarga)	2		10		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan (Dokumen)	2		2		10		0		2						2		2		100			
		2.22.07.7.01.0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional			113.000.000		16.216.803		-		-		-						-		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.01.0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi			76.000.000		11.137.369		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianyan Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi (Lembaga)	2		9		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.01.0003	Sosialisasi Adat Istiadat			145.000.000		11.312.693		20.000.000		-		1.280.000						1.280.000		1.280.000	100	0,88		
			Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat (Orang)	25		20		50		0		25						25		25		100			
		2.22.07.7.01.0004	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan			57.211.628		6.742.200		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina (Keluarga)	2		10		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.01.0005	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh			46.835.120		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh (Buku)	1		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.01.0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang			100.000.000		17.970.280		20.000.000		-		5.600.000						5.600.000		5.600.000	100	5,6		
			Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan (Dokumen)	2		2		10		0		2						2		2		100			
		2.22.07.7.02	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat			316.100.000		90.829.520		20.000.000		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pengembangan hukum adat yang dibina	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat (Orang)	50		20		30		0		0						0		0		0			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K%	Rp%		
				Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat (Orang)	50		40		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.02.0001	Penguatan Peradilan Adat			110.000.000		11.412.517		20.000.000		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat (Orang)	50		20		30		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.02.0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)			85.000.000		6.742.200		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.02.0003	Pembinaan Mediasi Adat			25.100.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat (Laporan)	3		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.02.0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat			96.000.000		72.674.803		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat (Orang)	50		40		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.03	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat			346.780.588		11.599.820		20.000.000		-		19.915.000						19.915.000		19.915.000	16,23	5,74		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Orang)	50		20		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan (Eksemplar)	100		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi (Kasus)	5		0		0		0		0						0		0		0			
				Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat (Unit)	22		0		25		0		25						25		25		113,64			
		2.22.07.7.03.0001	Pembinaan Kapasitas MAA			30.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.03.0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat			66.380.588		11.599.820		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Orang)	50		20		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.03.0003	Rapat Kerja MAA			40.400.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.03.0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat			120.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan (Eksemplar)	100		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.03.0005	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat			30.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.03.0006	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat			30.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K%	Rp%		
			Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Kasus Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi (Kasus)	5		0		0		0		0						0		0		0			
		2.22.07.7.03.0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat			30.000.000		-		20.000.000		-		19.915.000						19.915.000		19.915.000	113,64	66,38		
			Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat (Unit)	22		0		25		0		25						25		25		113,64			
				JUMLAH		**8.658.128.119**		**1.692.448.224**		**1.692.691.920**		**445.401.527**		**496.678.088**						**942.079.615**		**942.079.615**				
				Rata-rata capaian kinerja (%)																			**8,03**	**10,88**		
				Predikat kinerja																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Perencanaa yang terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Renja SKPD.
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	1. Keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kopentensi teknis tertentu. 2. Perubahan regulasi atau kebijakan nasional/daerah yang memerlukan penyesuaian program dan kegiatan. 3. Keterbatasan anggaran atau refocusing anggagaran, yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapt dilaksanakan secara optimal.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	1. Melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap capaian indikator kinerja 2. Menyusun rencana aksi percepatan (action plan) terhadap kegiatan yang realisasinya masih rendah 3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait untuk mengatasi hambatan teknis.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:	1. Penajaman indikator kinerja dan target yang lebih realistis dan terukur, selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD. 2. Penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun berjalan. 3. Penguatan alokasi anggaran pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada indikator kinerja utama.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Hasil analisis capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2026 tidak berdampak secara langsung terhadap target indikator kinerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, sehingga tidak diperlukan perubahan indikator dan target indikator kinerja perangkat daerah. Tabel berikut ini memberikan gambaran indikator kinerja perangkat daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 beserta targetnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Renstra	Target Indikator Kinerja OPD	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Indikator Kinerja OPD
Murni 2026						Perubahan 2026			
	Indikator Kinerja Utama PD (IKU)								
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Angka	62,15	62,15	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Angka	62,15
2	Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh	Persen	97,44	97,44	Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh	Persen	97,44
	Indikaotr Kinerja Daerah (IKD)								
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	40,74	40,74	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	Persen	54,50

3.2 Perubahan Indikator Kinerja Program

Penyesuaian indikator kinerja program perlu dilakukan untuk merespons dinamika kebutuhan perangkat daerah, perubahan fokus strategis, serta peningkatan efektivitas ketercapaian target. Perubahan ini bertujuan agar pengukuran kinerja menjadi lebih objektif, terukur, dan relevan, penyelarasan strategis menyesuaikan indikator program dengan kriteria target baru, serta peningkatan efesiensi untuk menghapus indikator yang kurang relevan atau sulit diukur secara objektif. Namun pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe tidak terdapat perubahan indikator program, tabel berikut ini memberikan gambaran indikator kinerja program Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra	Target Indikator Kinerja Program	Indikator Program	Satuan	Target Indikator Kinerja Program
1	2	3		4	5	6	7	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe	Nilai Sakip OPD	Kategori/Nilai	B. 62,15	B. 62,15	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100
2	Program Majelis Adat Aceh	Indeks Adat Istiadat Aceh	Nilai	97.44	97.44	Meningkatnya Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	Persen	100

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 yang disajikan pada Bab III ini merupakan hasil penyesuaian terhadap Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester pertama serta perkembangan kondisi yang terjadi selama tahun berjalan.

Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut disajikan dalam bentuk matriks yang memuat indikator kinerja, target capaian, lokasi, kelompok sasaran, pagu indikatif, serta sumber pendanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2026.

Perubahan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 memuat penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang meliputi pergeseran pagu anggaran, penyesuaian target kinerja, perubahan lokasi maupun kelompok sasaran kegiatan, serta penyempurnaan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat pula program, kegiatan, dan subkegiatan yang tidak mengalami perubahan dan tetap dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2026. Secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 turun dari yang semula sebesar Rp. 1.980.376.406,00,-. Kemudian pada Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 menjadi Rp.1.692.691.920, 00,- ada penurunan sebesar Rp. 287.684.486,00,-. Hal ini disebabkan karena adanya efesiensi anggaran yang dilaksanakan sesuai Instruksi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan efesiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2025.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   Program ini semula pada anggaran murni tahun 2026 sebesar Rp.1.754.771.286,00,-, dan pada perubahan Renja 2026 terjadi penurunan pagu menjadi Rp. 1.612.691.920,00,-. Adapun rincian

kegiatan yang didalamnya terdapat kenaikan atau penurunan anggaran dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   a. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pada anggaran murni sebesar 26.858.000,00,- berkurang menjadi Rp. 0,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pada anggaran murni sebesar Rp. 7.000.000,00,- pada perubahan Renja 2026 terjadi penurunan anggaran menjadi Rp. 1.500.000,00,- disebabkan karena adanya pengurangan anggaran sehubungan dengan Efesiensi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pada anggaran murni sebesar Rp. 1.184.023.288,00,- pada perubahan Renja terjadi pertambahan pagu yaitu sebesar Rp. 1.194.342.000,00,- dikarenakan adanya penambahan pegawai PPPK di Sekretaraiat Majelis Adat Aceh.
4. Kegiatan Administrasi Umu Perangkat Daerah.
   a. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, pada anggaran murni sebesar Rp. 10.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 3.000.000,00,- menjadi Rp. 7.000.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
   b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pada anggaran murni sebesar Rp. 6.250.000,00,-,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 1.250.000,00,-,- menjadi Rp. 5.000.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
   c. Sub kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan, pada anggaran murni sebesar Rp. 5.000.000,00,-,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 3.500.000,00,-

menjadi Rp. 1.500.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

d. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, pada anggaran murni sebesar Rp. 1.140.000,00,- pada perubahan Renja berkurang menjadi Rp. 0,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

e. Sub kegiatan Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultsi SKPD, pada anggaran murni sebesar Rp. 40.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 20.000.000,00,- menjadi Rp. 20.000.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, pada anggaran murni sebesar Rp. 1.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 500.000,00,- menjadi Rp. 500.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

   b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pada anggaran murni sebesar Rp. 394.300.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 53.000.000,00,- menjadi Rp. 341.300.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   a. Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pada anggaran murni sebesar Rp. 29.600.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 14.000.000,00,- menjadi Rp. 15.600,000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

   b. Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada anggaran murni sebesar Rp. 25.600.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 9.850.080,00,- menjadi Rp. 15.749.920,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangungan Lainnya, pada anggaran murni sebesar Rp. 15.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 10.000.000,00,- menjadi Rp. 5.000.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangungan Lainnya, pada anggaran murni sebesar Rp. 9.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 3.800.000,00,- menjadi Rp. 5.200.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

2. Program Majelis Adat Aceh (MAA).

Program ini semula pada anggaran murni tahun 2026 sebesar Rp.225.605.120,00,-, dan pada perubahan Renja 2026 terjadi penurunan pagu menjadi Rp. 80.000.000,00,-. Adapun rincian kegiatan yang didalamnya terdapat kenaikan atau penurunan anggaran dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat.
   a. Sub kegiatan Pembinaan Adat Seumapa/ Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional, pada anggaran murni sebesar Rp. 40.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang menjadi Rp. O,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
   b. Sub kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat, pada anggaran murni sebesar Rp. 50.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang menjadi Rp. O,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
   c. Sub kegiatan Publikasi Adat dan Adat Istiadat melalui Media Luar Ruang, pada anggaran murni sebesar Rp. 30.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 10.000.000,00,- menjadi Rp. 20.000.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat.
   a. Sub Kegiatan Penguatan Peradilan Adat, pada anggaran murni sebesar Rp. 25.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 5.000.000,00,- menjadi Rp. 20.000.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

b. Sub Kegiatan Sosialisai Hukum Adat dan Lembaga Adat, pada anggaran murni sebesar Rp. 20.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang menjadi Rp. 0,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat.
   a. Sub kegiatan Penerbitan Majalah dan Buku tentag Adat dan Adat Istiadat, pada anggaran murni sebesar Rp.35.000.000,00,- pada perubahan Renja berkurang menjadi Rp. 0,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
   b. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat, pada anggaran murni sebesar Rp. 29.605.120,00,- pada perubahan Renja berkurang sebesar Rp. 5.605.120,00,- menjadi Rp. 20.000.000,00,- dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

Adapun rincian Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.0.00.0.00.05.0000	**Sekretariat Majelis Adat Aceh**							**1.980.376.406,00**	**1.692.691.920,00**	**1.692.691.920,00**	**-287.684.486,00**							**1.735.803.046,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.980.376.406,00**	**1.692.691.920,00**	**1.692.691.920,00**	**-287.684.486,00**							**1.735.803.046,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.980.376.406,00**	**1.692.691.920,00**	**1.692.691.920,00**	**-287.684.486,00**							**1.735.803.046,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD Nilai Sakip OPD Nilai Sakip OPD Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen B 62,15 B 62,15 Kategori/Nilai Kategori/Nilai B 62,15 Kategori/Angka B 62,15 Kategori/Nilai**	**1.754.771.286,00**	**1.612.691.920,00**	**1.612.691.920,00**	**-142.079.366,00**					**Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh kota Lhokseumawe Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe**		**1.675.803.046,00**	
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan				5 Unit	5 Unit	26.858.000,00	0,00	0,00	-26.858.000,00							0,00	
	2.22.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	6 Unit	26.858.000,00	0,00	0,00	-26.858.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
		[Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah]	***Nilai SAKIP OPD***	***60.75***	***0***	***60.75***			***1.727.913.286,00***	***1.612.691.920,00***	***1.612.691.920,00***	***-115.221.366,00***						***60.75***	***1.675.803.046,00***	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-5.500.000,00							7.000.000,00	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	7.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-5.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			7.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	1.184.023.286,00	1.194.342.000,00	1.194.342.000,00	10.318.714,00							1.185.753.286,00	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				294 Orang/ bulan	294 Orang/ bulan	1.184.023.286,00	1.194.342.000,00	1.194.342.000,00	10.318.714,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			1.185.753.286,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	62.390.000,00	26.500.000,00	33.500.000,00	-28.890.000,00							21.400.000,00	
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			10.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	6.250.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	-1.250.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			4.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			2.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				10 Laporan	10 Laporan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			5.400.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				134 Laporan	134 Laporan	395.300.000,00	357.649.920,00	341.800.000,00	-53.500.000,00							400.849.760,00	
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			1.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				134 Laporan	134 Laporan	394.300.000,00	357.149.920,00	341.300.000,00	-53.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			399.849.760,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	79.200.000,00	32.700.000,00	41.549.920,00	-37.650.080,00							60.800.000,00	
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	29.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-14.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			33.200.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	25.600.000,00	13.600.000,00	15.749.920,00	-9.850.080,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			25.600.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				10 Unit	10 Unit	9.000.000,00	2.000.000,00	5.200.000,00	-3.800.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			2.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
2.	**2.22.07**	**PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)**	**Indeks Adat Istiadat Aceh Indeks Adat Istiadat Aceh**				**100 persen undefined undefined**	**97,44 Nilai**	**225.605.120,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**-145.605.120,00**					**Kemukiman dalam wilayah kota Lhokseumawe Kemukiman dalam wilayah Kota Lhokseumawe Masyarakat dan Tokoh Adat**		**60.000.000,00**	
		[Meningkatnya peran Majelis Adat Aceh (MAA) untuk Fasilitasi sengketa adat]	***Persentase Fasilitasi sengketa adat***	***99.00***	***0***	***97.43***			***225.605.120,00***	***80.000.000,00***	***80.000.000,00***	***-145.605.120,00***						***97.44***	***60.000.000,00***	
	2.22.07.7.01	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Meningkatnya Jumlah Kaderisasi Adat Aceh				5 Jenis	5 Jenis	120.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-80.000.000,00							40.000.000,00	
	2.22.07.7.01.0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional*				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.01.0003	Sosialisasi Adat Istiadat	*Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat*				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.01.0003	Sosialisasi Adat Istiadat	*Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat*				-	50 Orang	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			20.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.07.7.01.0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	*Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan*				10 0	10 0	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			20.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.02	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Meningkatnya Jumlah penggunaan Hukum Kearifan Lokal				3 Jenis	3 Jenis	45.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-25.000.000,00							20.000.000,00	
	2.22.07.7.02.0001	Penguatan Peradilan Adat	*Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat*				30 Orang	30 Orang	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			20.000.000,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.02.0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	*Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat*				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.03	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat	Meningkatnya Jumlah pemahaman Adat Istiadat				5 Jenis	5 Jenis	60.605.120,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-40.605.120,00							0,00	
	2.22.07.7.03.0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	*Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan*				150 Eksemplar	150 Eksemplar	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.22.07.7.03.0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	*Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat*				25 Unit	25 Unit	25.605.120,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.605.120,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya			0,00	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	J U M L A H								**1.980.376.406,00**	**1.692.691.920,00**	**1.692.691.920,00**	**-287.684.486,00**							**1.735.803.046,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran.

Dalam proses penyusunannya Perubahan Rencana Kerja (P-renja) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) yang sebelumnya juga dilihat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari Perubahan APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026. Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, September 2026
Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh
Kota Lhokseumawe

Shari Anita, S. Sos, MM
NIP. 197810292005042002

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
Jalan T. Hamzah Bendahara Lantai Dasar Islamic Center Kode Pos 24351
Email : setmaalhokseumawe@gmail.com Website : maa.lhokseumawekota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026 PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, perlu Membentuk Tim pelaksana kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe tahun 2025-2045;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe tahun 2025-2045;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;
16. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja RKPD Tahun 2026;
18. Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor 000.824/646/SE/2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut “Tim Penyusun”, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Juni 2026

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS
ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE,

SHARI ANITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026
PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA
LHOKSEUMAWE

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE.

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kepala Sekretariat MAA	Ketua	
2.	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
4.	Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi	Anggota	
5.	2 (dua) Orang Staf	Anggota	

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE,

SHARI ANITA